

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA

Jl. Raya Kendung No. 115 – 117 Surabaya Telp.(031)7409135 Fax. 7409135
Email : rsud_bd@surabaya.go.id

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan RidhoNya dapat tersusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah RSUD Bhakti Dharma Husada Tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah RSUD Bhakti Dharma Husada Tahun 2025 memuat program, kegiatan indikator kinerja dan dana indikatif yang ditetapkan dalam Perda tentang RKPD serta hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan semester pertama tahun berjalan.

Akhir kata besar harapan kami Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah RSUD Bhakti Dharma Husada Tahun 2025 ini dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Surabaya.

Surabaya, 10 Juni 2025
Plt. Direktur,



dr. Arif Setiawan, M.Kes
Pembina/ IVa
NIP 198201092011011007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3 Maksud dan Tujuan	9
I.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAUN LALU	11
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	45
BAB V PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Bhakti Dharma Husada sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	14
Tabel 2.2 Hasil Survey Kepuasan Pelanggan RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Tahun 2023 – 2025 TW I	20
Tabel 2.3 Data Jumlah Keluhan Pelanggan di RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Tahun 2023 – 2025 TW I	22
Tabel 2.4 Data Jumlah Pasien Baru RSUD Bhakti Dharma Husada kota Surabaya Tahun 2023 – 2025 TW I	22
Tabel 2.5 Data Jumlah Pasien Lama di RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Tahun 2023 – 2025 TW I	23
Tabel 2.6 Cakupan Kunjungan Pasien RSUD Bhakti Dharma Husada Tahun 2023 – 2025 TW I	24
Tabel 2.7 10 (sepuluh) Penyakit Terbanyak di Instalasi Rawat Jalan RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Tahun 2025 TW I	24
Tabel 2.8 10 (sepuluh) Penyakit Terbanyak di Instalasi Rawat Inap RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Tahun 2025 TW I	25
Tabel 2.9 10 (sepuluh) Penyakit Terbanyak di Instalasi Gawat Darurat RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Tahun 2025 TW I	26
Tabel 2.10 Indikator Kinerja Rawat Inap RSUD Bhakti Dharma Husada Tahun 2023 – 2025 TW I	27

Tabel 2.11	Capaian SPM RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Tahun 2023 – 2025 TW I	28
Tabel 2.12	Jumlah Pelatihan Tahun 2023 – 2025 TW I	30
Tabel 2.13	Data Kepegawaian Bulan Maret 2025	30
Tabel 2.14	Tingkat kedisiplinan Tahun 2023 – 2025 TW I	34
Tabel 2.15	Sales Growth Rate Tahun 2023 – 2025 TW I	35
Tabel 2.16	<i>Cost Recovery Rate</i> APBD dan BLUD Tahun 2023 – 2025 TW I	36
Tabel 2.17	Capaian Realisasi Pendapatan Tahun 2025 TW I	36
Tabel 2.18	Capaian Realisasi Belanja Tahun 2025 TW I	36
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022-2024	36
Tabel 2.20	RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Sesuai	37
Tabel 2.21	Renstra RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Isu Strategis	38
Tabel 2.22	Hubungan Antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun	44
Tabel 3.1	2021 – 2026 dengan RPJMD Tahun 2021 – 2024	48

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal dan padat teknologi. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di rumah sakit menyangkut berbagai fungsi, antara lain pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup jenis disiplin pelayanan. Agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, rumah sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya penyelenggaraan kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat termasuk swasta. Strategi untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut tertuang dalam Rencana Kerja PD.

I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

I.1.2. Proses Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Paragraf 3 Pasal 355-358 terkait penetapan perubahan RKPD sebagai berikut :

1. Persiapan Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna

- memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
2. Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud paling lambat minggu ketiga bulan Juli;
 3. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
 4. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD
 5. Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
 6. Peraturan Gubernur tentang perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 7. Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi
 8. Peraturan Bupati/Wali Kota dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD..

I.1.3. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah ini susunan organisasi dan tata laksana yang digunakan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa terdapat Unit Pelaksana

Teknis Dinas daerah di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Pada pasal 9 ayat (2)) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan, dan barang milik Daerah serta kepegawaian serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Adapun rincian tugas dan fungsi rumah sakit mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 96 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma husada Kota Surabaya. Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, RSUD Bhakti Dharma Husada mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serat penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

I.2. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran adalah :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -0 Undnag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
24. Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bapenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan RenjaK/L;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kota Surabaya 2005-2025;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 – 2025;
36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034;
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026;
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
40. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
41. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya;

42. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
43. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 821.1/16291/436.8.3/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
44. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/365/436.1.2/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat dan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit.

I.3.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta pagu indikatif pada program, kegiatan dan sub kegiatan PD;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja unit layanan di lingkungan Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 129 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

I.1.2 Proses Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

I.1.3 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya disingkat RSUD BDH merupakan instansi pelayanan publik di bidang kesehatan sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang berlokasi di wilayah Surabaya Barat. RSUD BDH mulai menerima pasien pada tahun 2010 dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan di RSUD Bhakti Dharma Husada. Pada tahun 2014 RSUD BDH menjadi instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/282/436.1.2/2014 tanggal 27 Juni 2014.

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel 2.1. Adapun reuiu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada capaian indikator Kegiatan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana rumah sakit yang masih 0%. Hal ini juga dikarenakan masih belum terealisasinya pengembangan rumah sakit & pengadaan alat Kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas Kesehatan di RSUD Bhakti Dharma Husada

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan TW I tahun 2025, Untuk 2 (dua) indikator pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, keduanya memenuhi target yaitu persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target dengan realisasi 92.93% capaian 110.63% dan indikator tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan dengan realisasi 98.14%, capaian 110.27%. Sedangkan untuk indikator kegiatan dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Pelayanan BLUD semua sudah mencapai target 100%. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit mencapai target dengan realisasi 104.70%.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- a. Ketercapaian program/ Kegiatan : Untuk ketercapaian indikator baik pada Program maupun kegiatan dikarenakan adanya ketepatan antara perencanaan dan pelaksanaan serta tidak adanya kendala teknis yang berarti pada pelaksanaan baik program maupun kegiatan.
- b. Ketidaktercapaian program/ Kegiatan : Untuk indikator kegiatan yang belum mencapai target dikarenakan masih adanya kebijakan/ menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan terkait dengan realisasi rencana pengadaan alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan ketercapaian target kinerja program dan kegiatan di atas,

memberi implikasi pada kemudahan Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja renstra lima tahunan.

5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Dalam upaya mengendalikan faktor penyebab ketidaktercapaian target kinerja program/kegiatan diatas atau dalam upaya mempertahankan agar program/kegiatan selalu tercapai, maka diambil tindakan sebagai berikut :

- Penentuan target kinerja saat perencanaan memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya serta kondisi rumah sakit saat berjalan.
- Dalam rangka meningkatkan sarana prasarana secara berkelanjutan maka akan disediakan anggaran untuk perbaikan/ pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit dan juga anggaran untuk pembelian maupun peremajaan sarana prasarana rumah sakit.
- Dalam rangka peningkatan sarana prasarana kesehatan secara berkesinambungan maka akan dianggarkan untuk pembelian alat Kesehatan/ penunjang medik pelayanan Kesehatan guna mendukung pengembangan pelayanan di RSUD Bhakti Dharma Husada serta peremajaan alkes, serta melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait arahan/ kebijakan realisasi anggaran pengadaan alat Kesehatan/ penunjang medik pelayanan Kesehatan.
- Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mempertimbangkan hasil realisasi indikator capaian masing – masing program/kegiatan/sub kegiatan
- Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan melalui aplikasi eplanning.surabaya.go.id dengan menu monev TSPK. Untuk monitoring dari segi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan pada tiap – tiap paket pekerjaan maka dilakukan setiap bulan melalui aplikasi econtrolling.surabaya.go.id

Table 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Bhakti Dharma Husada sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																						
1.02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																					
1.02.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			247,322,516		227,285,300		246,136,139		15,482,767	-		-		-		15,482,767		15,482,767		6,26%	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariat an [478]	89 %		92.21 %		89 %		98.14 %		-		-		-		98.14 %		98.14 %		110.27%	
				Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target [1352]	84 %		95.96 %		82 %		92.93 %		-		-		-		92.93 %		92.93 %		110.63%	
1.02.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			35,732,522				77,005,757		15,250,767	-		-		-		15,250,767		15,250,767		42.68%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan	100 %			100 %		100 %			-		-		-		100 %		100 %		100.00%	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9	10	11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						Tunjangan ASN [9]																				
1.02.01.2.02.0001						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [91]		35,732,522			77.005.757		15.250.767		-		-		-		15.250.767		15.250.767		42,68%	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [5695]	192 Orang / bulan		478 Orang /bulan		478 Orang /bulan	473 Orang /bulan		-		-		-		473 Orang /bulan	473 Orang /bulan		246.35%			
1.02.01.2.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		45,112,416			1,210,000		232,000		-		-		-		232,000		232,000		0.51%	
						Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah [1241]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%	
1.02.01.2.08.0004						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [908]		45,112,416			1.210.000		232.000		-		-		-		232.000		232.000		0,51%	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [5696]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan		-		-		-		3 Laporan	3 Laporan				25.00%	
1.02.01.2.10						Peningkatan Pelayanan		166,477,578			167,920,381		0		-		-		-		0		0		0.00%	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
					BLUD																						
						Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi [1663]	100 %		100 %			100 %			-		-		-			100 %		100 %		100.00%	
1.02.01.2.10.0001					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [3172]			166,477,578			167.920.381		0		-		-		-			0		0		0,00%	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan [5697]	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja			1 Unit Kerja			-		-		-			1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00%	
1.02.02					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			8,436,207		16,674,141		40,715,706		8,400		-		-		-		8,400		8,400		0,10%	
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit [1350]	100 %			104.7 2 %			98 %		104.7 0 %		-		-		-		104.7 0 %		104.7 0 %		104.70%	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
1.02.02.2.01						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8,436,207			40,715,706		8,400		-		-		-		8,400		8,400		0.10%	
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit [10]	100 %			100 %			0 %		-		-		-		0 %		0 %		0.00%		
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit [10]	100 %			100 %			0 %		-		-		-		0 %		0 %		0.00%		
1.02.02.2.01.0014						Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan [82]			8,332,225			12.865.629		8.400		-		-		-		8.400		8.400		0,10%	
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit			16 Unit		20 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							[5693]																						
1.02.02.2.01 0022							Pengembangan Rumah Sakit [4694]		103,983				27.850.077		0		-		-		-		0		0		0,00%		
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan / atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit [6878]	1 Unit		1 Unit		1 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%			

Sumber: E-Planning, 2025

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

RSUD Bhakti Dharma Husada merupakan rumah sakit umum dengan klasifikasi kelas B berdasarkan Surat Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Timur Nomor P2T/4/03.23/01/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019. Selain itu sejak tanggal 19 Mei 2023, RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI menjadi RS Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1380/2023. Berdasarkan Permenkes Nomor 03 Tahun 2020, RSUD Bhakti Dharma Husada adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan pada semua bidang dan jenis penyakit meliputi :

1. Pelayanan medik;
2. Pelayanan kefarmasian;
3. Pelayanan keperawatan dan kebidanan;
4. Pelayanan penunjang klinik;
5. Pelayanan penunjang non klinik;
6. Pelayanan rawat inap.

Sesuai peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 137 Tahun 2023, rumah sakit berdasarkan tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Kinerja pelayanan rumah sakit diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama SKPD berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah Usia Harapan Hidup (UHH) yang akan dicapai melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan indikator Hasil Penilaian Akreditasi RS. Hasil penilaian akreditasi terakhir

kali pada Tahun 2019 dengan hasil Paripurna. Pada tahun 2022, RS telah melakukan Survei Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) dengan hasil Paripurna berdasarkan Surat Keterangan Hasil Akreditasi Nomor: 0027.SKH- AKRE.X.2022.

RSUD Bhakti Dharma Husada merupakan RS milik Pemerintah Kota Surabaya yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh, oleh karena itu dalam pelaporan evaluasi kinerja pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Sedangkan laporan kinerja PD menggunakan dasar Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

CAPAIAN KINERJA NON KEUANGAN

1. Perspektif Pelanggan

a) Kepuasan Pelanggan

Tabel 2.2
Hasil Survey Kepuasan Pelanggan RSUD Bhakti Dharma Husada
Tahun 2023 – 2025 TW I

No	Variabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		2023	2024	2025 TW I
1	Persyaratan	3.78	3.83	3.93
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur Pelayanan	3.73	3.80	3.89
3	Waktu Pelayanan	3.71	3.72	3.84
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3.92	3.99	3.96
5	Produk Pelayanan	3.74	3.79	3.87
6	Kompetensi/ Kemampuan Pelayanan	3.72	3.83	3.91
7	Perilaku Petugas Sopan dan Ramah	3.75	3.88	3.89
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.67	3.80	3.91
9	Penanganan Pengaduan	3.71	3.71	3.80

No	Variabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		2023	2024	2025 TW I
	Rata-rata	93.67	95.72	97.22
	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Laporan SKM 2025

Berdasarkan hasil survey diatas, menunjukkan bahwa pada triwulan 1 tahun 2025 seluruh aspek pelayanan sudah tergolong sangat baik. Dari semua variabel, variable penanganan pengaduan yang memiliki nilai paling kecil dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Walaupun terdapat nilai paling kecil, tetapi secara keseluruhan rata-rata hasil kepuasan masuk kategori sangat baik. Dengan adanya hasil survey ini, diharapkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Bhakti Dharma Husada terus menjadi lebih baik kepada setiap pasien yang berobat dan berkunjung ke Rumah Sakit. Untuk Pelayanan Pengaduan, rumah sakit telah memiliki fasilitas pengaduan baik secara tatap muka maupun secara tidak langsung (melalui *whatsapp*, telpon, media sosial, *website*, aplikasi wargaku, google review, dan email) yang semuanya akan direspon kurang dari 24 jam.

Pada tahun 2023 hingga 2025 TW I, penilaian kepuasan Masyarakat untuk RSUD Bhakti Dharma Husada dilakukan setiap bulan. Hasil dari nilai survey kepuasan Masyarakat menjadi salah satu indikator penilaian kinerja operasional RS. Hal ini dilakukan dalam rangka agar masyarakat semakin puas dan percaya dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya.

b) Keluhan Pelanggan

Indikator keluhan pelanggan ini mengukur sejauh mana ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Keluhan pelanggan berasal dari berbagai sumber baik secara tertulis, komplain langsung ataupun melalui sosial media.

Tabel 2.3
Data Jumlah Keluhan Pelanggan di RSUD Bhakti Dharma Husada
Tahun 2023-2025 TW I

No	Variabel	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I
1	Jumlah Keluhan Pelanggan	136 Keluhan	147 Keluhan	26 Keluhan

Sumber : Bidang Umum dan Keuangan Tahun 2025

Pada Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada triwulan 1 tahun 2025, keluhan yang diterima sebanyak 26 keluhan. Rumah Sakit telah memiliki pelayanan pengaduan baik secara tatap muka maupun secara tidak langsung (melalui *whatsapp*, telpon, media sosial, *website*, aplikasi wargaku, google reviuw, dan email) yang semuanya akan direspon kurang dari 24 jam.

c) Akuisisi Pasien

Akuisisi pasien yaitu kemampuan rumah sakit untuk dapat menarik pasien baru. Angka Pasien baru ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana minat pasien baru menggunakan jasa layanan kesehatan yang disediakan di rumah sakit. Jumlah pasien baru di RSUD Bhakti Dharma Husada bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Data Jumlah Pasien Baru di RSUD Bhakti Dharma Husada
Tahun 2023-2025 TW I

No	Variabel	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025 TW I		
		Jumlah Pasien Baru			Jumlah Pasien Baru			Jumlah Pasien Baru		
		Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
1	Pasien Baru IGD	7.390	6986	14.376	7.198	7.332	14.530	1.770	1.800	3570
2	Pasien Baru IRJA	4.687	5.750	10.437	4.644	6.058	10.702	1.090	1.262	2352

Sumber : Data Rekam Medis Tahun 2025

Jika dilihat dari data tersebut, maka jumlah pasien baru dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami kenaikan baik di IGD maupun di IRJA. Artinya, tingkat akuisisi rumah sakit dalam mencari pasien baru menunjukkan hasil yang optimal. Sedangkan untuk gender lebih

banyak pasien baru laki – laki pada IGD dan sebaliknya lebih banyak pasien baru Perempuan pada IRJA. Untuk mengoptimalkan jumlah kunjungan pasien baru salah satunya dengan cara strategi pemasaran rumah sakit dengan menawarkan paket pemeriksaan *medical check up*.

d) Retensi Pasien

Retensi pasien yaitu kemampuan rumah sakit untuk mempertahankan hubungan dengan pasiennya. Semakin tinggi persentase retensi pelanggan maka semakin banyak pula pasien lama yang kembali menggunakan jasa rumah sakit karena merasa puas.

Tabel 2.5
Data Jumlah Pasien Lama di RSUD Bhakti Dharma Husada
Tahun 2023-2025 TW I

No	Variabel	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025 TW I		
		Jumlah Pasien Lama			Jumlah Pasien Lama			Jumlah Pasien Lama		
		Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
1	Pasien Lama IGD	14.459	18.069	32.528	17.016	22.223	39.239	4.344	4.583	8927
2	Pasien Lama IRJA	86.554	124.417	210.971	146.550	101.186	247.736	25.218	34.686	59.904

Sumber : Data Rekam Medis Tahun 2025

Jika dilihat dari data tersebut, jumlah pasien mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024, peningkatan pasien lama di IGD dan pasien lama di IRJA. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan rumah sakit dalam mempertahankan pasiennya dapat dinilai baik. Selain itu untuk gender, jumlah pasien lama baik di IGD maupun di IRJA didominasi oleh Perempuan.

e) Cakupan Kunjungan Pasien

Tabel 2.6
Cakupan Kunjungan Pasien RSUD Bhakti Dharma Husada
Tahun 2023-2025 TW I

No	Indikator Penilaian	Capaian Th. 2023			Capaian Th. 2024			Capaian Th. 2025		
		Lk	Pr	TOTAL	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
1	Kunjungan IGD	21.275	23.997	45.272	24.214	29.555	53.769	6.114	6.383	12497
2	Kunjungan Rawat Jalan	91.325	130.083	221.408	105.830	152.608	258.438	26.308	35.948	62.256

Sumber : Data Rekam Medik Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian tahun 2024 untuk jumlah kunjungan baik IGD maupun Rawat Jalan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Begitu juga untuk tahun 2025 TW I, kunjungan pasien baik pada IGD maupun Rawat Jalan di dominasi oleh pasien perempuan.

Tabel 2.7
10 (sepuluh) Penyakit Terbanyak di Instalasi Rawat Jalan RSUD Bhakti Dharma Husada Tahun 2025 TW I

No	No. ICD	Diagnosa	Lk	Pr	Ket
1	I10	Essential (primary) hypertension	2366	3898	TIDAK MENULAR
2	M54.5	Low back pain	1485	3578	TIDAKMENULAR
3	E78.5	Hyperlipidaemia, unspecified	1370	2262	TIDAK MENULAR
4	E11.4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus with neurological complications	1441	2147	TIDAK MENULAR
5	I11.9	Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	1110	1888	TIDAK MENULAR
6	K30	Dyspepsia	905	2075	TIDAK MENULAR
7	M17.0	Primary gonarthrosis, bilateral	514	2433	TIDAK MENULAR
8	I69.3	Sequelae of cerebral infarction	1443	1313	TIDAK MENULAR
9	N18.0	End-stage renal disease	1267	1229	TIDAK MENULAR
10	E79.0	Hyperuricaemia without signs of inflammatory arthritis and tophaceous disease	963	905	TIDAK MENULAR

Sumber: Unit Rekam Medik, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penyakit terbanyak di Instalasi Rawat Jalan RSUD Bhakti Dharma Husada Tahun 2025 TW I adalah hipertensi sehingga untuk program Promosi Kesehatan RS (PKRS) di Instalasi Rawat Jalan akan difokuskan pada penyakit hipertensi dan penyakit lainnya yang menduduki daftar penyakit terbanyak pada tabel di atas

Tabel 2.8
10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak Di Instalasi Rawat Inap RSUD Bhakti Dharma Husada Tahun 2025 TW I

NO	No. ICD	Diagnosa	Lk	Pr	KET
1	I10	Essential (primary) hypertension	153	240	TIDAK MENULAR
2	E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	126	221	TIDAK MENULAR
3	D64.9	Anaemia, unspecified	127	209	TIDAK MENULAR
4	E87.6	Hypokalaemia	94	168	TIDAK MENULAR
5	E87.1	Hypo-osmolality and hyponatraemia	116	126	TIDAK MENULAR
6	A91	Dengue haemorrhagic fever	115	107	TIDAK MENULAR
7	I63.3	Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries	107	88	TIDAK MENULAR
8	J18.9	Pneumonia, unspecified	112	79	MENULAR
9	A09	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	115	74	MENULAR
10	N19	Unspecified renal failure	81	88	TIDAK MENULAR

Sumber: Unit Rekam Medik, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penyakit terbanyak di Instalasi Rawat Inap RSUD Bhakti Dharma Husada Tahun 2025 TW I adalah Hipertensi yang termasuk golongan penyakit tidak menular sehingga untuk program Promosi Kesehatan RS (PKRS) di Instalasi Rawat Inap masih akan difokuskan pada penyakit hipertensi dan

penyakit degeneratif lainnya yang menduduki daftar penyakit terbanyak pada tabel di atas

Tabel 2.9
10 (sepuluh) Penyakit Terbanyak di Instalasi Gawat Darurat
RSUD Bhakti Dharma Husada Tahun 2025 TW I

NO	No. ICD	Diagnosa	Lk	Pr	KET
1	R50.9	Fever, unspecified	984	931	TIDAK MENULAR
2	R11	Nausea and vomiting	471	689	TIDAK MENULAR
3	R10.4	Other and unspecified abdominal pain	391	670	TIDAK MENULAR
4	J06.9	Acute upper respiratory infection, unspecified	483	515	MENULAR
5	K30	Dyspepsia	280	470	TIDAK MENULAR
6	A09.9	Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	233	264	MENULAR
7	J45.9	Asthma, unspecified	206	264	TIDAK MENULAR
8	R06.0	Dyspnoea	193	146	TIDAK MENULAR
9	H81.4	Vertigo of central origin	89	183	TIDAK MENULAR
10	N23	Unspecified renal colic	96	108	TIDAK MENULAR

Sumber: Unit Rekam Medik, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penyakit terbanyak di Instalasi Gawat Darurat RSUD Bhakti Dharma Husada Tahun 2025 TW I adalah demam sebagai salah satu gejala dari suatu penyakit sehingga untuk program Promosi Kesehatan RS (PKRS) di Instalasi Gawat Darurat masih akan difokuskan pada penyakit tersebut dan penyakit lainnya yang menduduki daftar penyakit terbanyak pada tabel di atas.

Trend penyakit tidak menular masih mendominasi baik di Rawat Jalan, Rawat Inap maupun IGD RSUD Bhakti Dharma Husada. Adanya pergeseran pola hidup yang mempengaruhi juga pola makan menyebabkan semakin meningkatnya penyakit degenerative.

2. Perspektif Bisnis Internal

a) Indikator Kinerja Rawat Inap

Tabel 2.10
Indikator Kinerja Rawat Inap RSUD Bhakti Dharma Husada
Tahun 2023-2025 TW I

No	Indikator	Standar	Capaian Th. 2023	Capaian Th. 2024	Capaian Th. 2025 TW I
Quality of Place					
1	BOR dalam %	60-85%	86%	85%	88%
2	AvLOS dalam hari	6-9 hari	4 Hari	3 hari	3 hari
3	TOI dalam hari	1-3 hari	1 Hari	1 hari	0 hari
4	BTO dalam kali	40-50 kali per TT	75 Kali per TT	88 kali per TT	23 kali per TT
5	<i>Net Death Rate (NDR)</i>	$\leq 25\%$	$\leq 25\%$	23,4%	24,6%
6	<i>Gross Death Rate (GDR)</i>	$\leq 45\%$	43.1%	38%	37,0%

Sumber : Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja rawat inap kita semakin meningkat dari tahun ke tahun. Indikator BOR melebihi standar yaitu 88% sedangkan indikator TOI dan BTO menunjukkan nilai yang belum ideal artinya menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur. Sebagai informasi bahwa jumlah tempat tidur saat ini sebanyak 218 TT. Adanya kenaikan BOR ini terkait dengan adanya evaluasi pemakaian TT yang dilakukan oleh pihak manajemen, selain itu adanya peningkatan mutu dan layanan RS yang menjadikan kepercayaan pelanggan terhadap RS semakin meningkat.

b) Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian SPM TW I mengacu pada Permenkes dan SK Direktur ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11 Capaian SPM Tahun 2025 TW I
RSUD Bhakti Dharma Husada

No	Jenis Pelayanan	Tahun 2025 Triwulan 1		
		Σ Indikator tiap pelayanan	Σ Indikator yang memenuhi SPM	% pencapaian *)
1	2	6	7	$8=7/6*100$
1	Instalasi Gawat Darurat	8	8	100,00
2	Instalasi Rawat Jalan	9	9	100,00
3	Instalasi Rawat Inap	16	14	87,50
4	Instalasi Bedah Sentral	7	7	100,00
5	Persalinan dan Perinatologi	9	8	88,89
6	Intensif/ ICU	2	2	100,00
7	Radiologi	4	3	75,00
8	Laboratorium	4	4	100,00
9	Rehabilitasi Medik	3	3	100,00
10	Farmasi	5	4	80,00
11	Gizi	3	3	100,00
12	Transfusi Darah	2	2	80,00
13	GAKIN	1	1	0,00
14	Rekam Medik	4	3	75,00
15	Instalasi Penyehatan Lingkungan	2	2	100,00
16	Administrasi dan Manajemen	9	8	88,89
17	Ambulance/Kereta Jenazah	3	3	100,00
18	Pemulasaran Jenazah	1	1	100,00
19	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	3	3	100,00
20	Laundry	2	2	100,00
21	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	3	3	100,00
	Total	99	92	92.93

Sumber : Tim SPM, RSUD BDH 2024

Pada Tahun 2025 pada Triwulan 1 capaian SPM Rumah Sakit adalah 92,93% atau terdapat 92 indikator yang memenuhi standar dari total 99 indikator SPM yang dilaksanakan di RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.

Beberapa indikator yang belum dalam pencapaian standar SPM ini adalah:

1. Angka kematian >48 jam di pelayanan rawat inap melebihi standar yang ditetapkan, karena pasien saat MRS dalam kondisi buruk/*end-stage* ditunjang dengan faktor usia pasien yang kebanyakan sudah usia lanjut.
2. Jam visite dokter spesialis belum memenuhi standar dikarenakan ada rentang waktu yang tidak dilakukan visite oleh dokter spesialis yaitu rentang pukul 08.00 – 14.00 WIB.
3. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria belum tercapai karena rumah sakit sebagai PPK tingkat 2 hanya menerima rujukan dari PPK 1 dengan pasien resiko tinggi baik terencana maupun kasus emergency seperti pre-eklamsia, kejadian partus macet, CPD, perdarahan antepartum, kegagalan induksi persalinan, malpresentasi, gawat janin, dan lain-lain.
4. Penulisan resep belum sesuai formularium belum tercapai dikarenakan kondisi klinis/darurat dari pasien yang memerlukan obat tertentu diluar formularium
5. Waktu tunggu hasil pelayanan Thorax foto belum tercapai dikarenakan beberapa rekomendasi thorax foto yang dilakukan di luar jam kerja dokter radiologi mengalami respon lama dalam pembacaan hasil ekspertisinya.
6. Walaupun telah menggunakan rekam medis elektronik tetapi masih ada beberapa rekam medik yang belum lengkap pengisiannya.
7. Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per orang per tahun belum memenuhi standar karena realisasi masih pada Triwulan 1, nilai 20 jam per tahun akan dapat diketahui setelah satu tahun berjalan. Saat ini, sebagian besar karyawan rutin mengikuti pelatihan internal yang diadakan rumah sakit dan pelatihan eksternal via *online*.

Rumah sakit terus berupaya melakukan perbaikan dan monitoring secara berkala terhadap indikator-indikator yang belum tercapai tersebut

3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

a. Pengembangan dan Pembinaan SDM

1) Program Diklat

Sumber daya manusia mempunyai faktor penting dalam upaya pemberian pelayanan prima. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan untuk pengembangan SDM dan meningkatkan kompetensi untuk mendukung aktivitas pelayanan.

Tabel 2.12
Jumlah Pelatihan Tahun 2023-2025 TW I

No.	Jenis Pelatihan	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025 TW I		
		Lk.	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
1	<i>Exhouse Training</i>	49	89	135	67	121	188	9	21	30
2	<i>Inhouse Training</i>	70	152	222	394	652	936	29	80	109

Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pelatihan *exhouse training* sebesar 3.62%, sedangkan *inhouse training* triwulan 1 tahun 2025 sebesar 13.18%. Capaian kegiatan *inhouse training* karena adanya pelatihan rutin pada tenaga Kesehatan khususnya perawat. Selain itu, rencana pada tahun 2025 juga akan dilakukan kegiatan *inhouse training* yang wajib diikuti semua pegawai seperti Refresh pelatihan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)/ Pelatihan K3RS, pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD), Pelatihan *Hand Hygiene*, pelatihan mutu, dsb.

Untuk SDM yang ditingkatkan kompetensinya Sebagian besar adalah perempuan hal ini karena sebagian besar dari jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN di RSUD Bhakti Dharma Husada adalah perempuan

Tabel 2.13
Data Kepegawaian bulan Maret 2025

JENIS KETENAGAAN	JUMLAH SDM	PNS	NON PNS	PPPK
TENAGA MEDIK DASAR				
Dokter Umum	25	8	6	11
Dokter Gigi	2	2	0	0
TENAGA MEDIK SPESIALIS DASAR				
Dokter Spesialis Bedah	1	1	0	0

JENIS KETENAGAAN	JUMLAH SDM	PNS	NON PNS	PPPK
Dokter Spesialis Penyakit Dalam	4	2	0	2
Dokter Spesialis Anak	2	1	0	1
Dokter Spesialis Obgyn	4	4	0	0
TENAGA SPESIALIS PENUNJANG MEDIK				
Dokter Spesialis Anestesiologi	3	2	0	1
Dokter Spesialis Radiologi	2	2	0	0
Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	1	0	1
Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	1	1	0
Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1	0	0
TENAGA MEDIK SPESIALIS LAIN				
Dokter Spesialis Mata	2	1	1	0
Dokter Spesialis THT-KL	2	1	0	1
Dokter Spesialis Syaraf	2	2	0	0
Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	2	2	0	0
Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	2	2	0	0
Dokter Spesialis Jiwa	1	1	0	0
Dokter Spesialis Paru	1	1	0	0
Dokter Spesialis Orthopedik	3	2	0	1
Dokter Spesialis Urologi	1	0	1	0
Dokter Spesialis Bedah Syaraf	0	0	0	0
Dokter Spesialis Bedah Plastik	1	1	0	0
Dokter Spesialis Forensik	1	1	0	0
TENAGA SUB SPESIALIS				
Sub Spesialis Bedah Onkologi	1	1	0	0
TENAGA MEDIK SPESIALIS GIGI MULUT				
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	0
Dokter Gigi Spesialis Konservasi / Endodonti	1	1	0	0
Dokter Gigi Spesialis Periodonti	0	0	0	0
Dokter Gigi Spesialis Orthodonti	0	0	0	0
Dokter Gigi Spesialis Prosthodonti	0	0	0	0
Dokter Gigi Spesialis Pedodonti	1	1	0	0
Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut	0	0	0	0
TENAGA PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAIN				

JENIS KETENAGAAN	JUMLAH SDM	PNS	NON PNS	PPPK
SPK	0	0	0	0
D1 Perawat	0	0	0	0
D3 Perawat	229	65	26	138
S1 Perawat	28	10	14	4
S2 Perawat	0	0	0	0
D3 Perawat Gigi	4	1	1	2
D3 Perawat Anestesi	7	6	1	0
S1 Perawat Anestesi	0	0	0	0
D3 Bidan	23	10	0	13
S1 / DIV Bidan	1	1	0	0
Apoteker	18	4	6	8
D1 Gizi	0	0	0	0
D3 Gizi	8	2	0	6
S1 Gizi	0	0	0	0
D3 Rekam Medis	8	3	2	3
D3 Kesehatan Lingkungan	4	1	0	3
D3 Teknik Elektromedik	8	3	0	5
D3 Farmasi / Analisis Farmasi dan Makanan	40	1	6	33
S1 Farmasi	4	4	0	0
D3 Analisis Kesehatan	25	2	1	22
D3 Analisis Kesehatan (Teknisi Pelayanan Darah)	1	0	1	0
D3 Radiologi	11	3	0	8
S1 Radiologi	2	0	2	0
D3 Fisioterapi	5	1	0	4
D3 Refraksi Optisi	1	0	0	1
D3 Hiperkes	1	0	1	0
D3 Okupasi Terapi	2	1	0	1
TENAGA NON MEDIS LAINNYA				
Magister Psikologi (Psikolog)	1	1	0	0
Sarjana Psikologi	0	0	0	0
Magister Kesehatan	0	0	0	0
Sarjana Kesehatan Masyarakat	13	3	2	8
Sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan	1	0	1	0
Sarjana Ekonomi	6	0	6	0
Sarjana Administrasi Negara	6	0	3	3
Sarjana Administrasi Publik	3	0	2	1
Sarjana Teknik Pangan	2	1	1	0
Sarjana Komunikasi	0	0	0	0
Sarjana Teknik Informatika / Komputer	5	1	3	1

JENIS KETENAGAAN	JUMLAH SDM	PNS	NON PNS	PPPK
Sarjana Pendidikan	1	0	1	0
Sarjana Fisika (Fisikawan Medik)	1	1	0	0
D3 Teknik Informatika / Komputer	0	0	0	0
S1 Ekonomi (Akuntansi)	2	0	2	0
D3 Ekonomi (Akuntansi)	1	1	0	0
S1 Hukum	1	0	1	0
D3 Statistik	1	0	1	0
D3 Sekretaris	1	0	1	0
SMA	182	2	180	0
SMK	79	0	79	0
SMP	0	0	0	0
D3 Keperawatan (Manajemen non SIP)	1	0	1	0
D3 Kebidanan (Manajemen non SIP)	3	1	2	0
D3 Farmasi / Analis Farmasi dan Makanan (Manajemen non SIP)	2	0	2	0
D3 Kesling (Manajemen non SIP)	1	0	1	0
Profesi Apoteker (Manajemen non SIP)	2	0	2	0
Struktural	12	12	0	0
JUMLAH	827	183	362	282

Sumber : KTK Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Dari tabel data kepegawaian diatas dapat diketahui bahwa jumlah total pegawai s.d Triwulan 1 tahun 2025 di RSUD Bhakti Dharma Husada sebanyak 827 orang dengan 2 macam jenis kepegawaian yaitu pegawai ASN yang terdiri dari pegawai PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pegawai Non ASN yaitu pegawai kontrak kerja dengan Surat Perintah Kerja (SPK) antara yang bersangkutan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm).

2) Tingkat Kedisiplinan

Tingkat kedisiplinan akan berdampak pada kinerja individu dan memiliki korelasi terhadap kecepatan dan ketepatan mutu pelayanan, sehingga jika terdapat tenaga pelayanan yang tidak disiplin sangat mempengaruhi proses pelayanan di rumah sakit.

Tabel 2.14
Tingkat Kedisiplinan Tahun 2023-2025 TW I

No.	Variabel	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Lk.	Pr.	Lk.	Pr.
1.	Tingkat Ketidakhadiran	0	0	0	0
2.	Tingkat Keterlambatan	80 orang	41 orang	28 Orang	20 Orang

Sumber : *Bagian Umum dan Keuangan Tahun 2024*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada triwulan 1 tahun 2025 tingkat ketidakhadiran karyawan nilainya nol, sedangkan tingkat keterlambatan sudah sangat minim yaitu sebanyak 28 karyawan laki-laki dan 20 karyawan perempuan, dikarenakan saat ini absen sudah bisa dilakukan secara *online* darimana saja melalui aplikasi kantorku. Untuk *punishment* pegawai yang terlambat ini salah satunya dengan potongan penerimaan gaji dan atau tunjangan pegawai yang bersangkutan.

b. Penelitian dan Pengembangan

1) Pengembangan Pelayanan Baru

Pada Tahun 2025, RSUD Bhakti Dharma Husada melakukan beberapa pengembangan pelayanan baru, antara lain:

- a) Pembangunan Gedung IRNA TB RO
- b) Pembangunan Ruangan *Cathlab*
- c) Penataan Sistem Tata Udara Ruang Steril Kemoterapi
- d) Pelayanan Kemoterapi
- e) Renovasi OK 6
- f) Renovasi Klinik Estetik
- g) Renovasi Interior Area Komersial
- h) Pengembangan Sistem *Pneumatic Tube*

2) Pengembangan Sistem Manajemen

Pada tahun 2025, RSUD Bhakti Dharma Husada melakukan beberapa pengembangan aplikasi pada SIM RS, antara lain :

- a) E-SPO
- b) SiCanang
- c) SiPemuja
- d) Aplikasi Survei Kepuasan Pasien

- e) SIPAK BLUD
- f) SIMBA
- g) TTE Integrasi
- h) SIPPI modul audit APD
- i) Sinar modul piutang
- j) Inovasi PETIS RUJAK (Pendaftaran Otomatis Rujukan Tanpa Berkas) yang akan dikembangkan menjadi PETIS RAJA (Pendaftaran Otomatis Rawat Jalan) seluruh alur pelayanan kesehatan berbasis digital dari sistem pendaftaran online, autoregister, elektronik rekam medik, elektronik diagnostic support order, peresepan obat elektronik sampai dengan elektronik jadwal kontrol. Inovasi ini mengintegrasikan Sistem Rekam Medis Elektronik dengan e-health, sistem antrian online BPJS, sistem VClaim, display antrian, permintaan pemeriksaan penunjang, sistem farmasi sampai dengan sistem jadwal kontrol berkelanjutan

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Pencapaian Indikator Keuangan

a) Sales Growth Rate (SGR)

Penilaian SGR digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan rumah sakit dalam meningkatkan keberhasilan yang dicapai. Nilai Sales Growth Rate sebagai berikut:

Tabel 2.15
Sales Growth Rate Tahun 2025 TW I

No.	Tahun			SGR (%)
		Tahun H	Tahun H-1	
1	2	3	4	5
3	2023	166.541.999.598,47	167.920.381.474,97	(0,82)
4	2024	174,175,281,713.35	166,541,999,598.47	4.58
5	2025 (s/d TW I)	40,703,240,501.38	174,175,281,713.35	(76.63)

Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai SGR Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 4.58% Hal ini dikarenakan pendapatan tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023.

b) *Cost Recovery Rate* (CRR)

Indikator CRR digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana kontribusi pendapatan fungsional rumah sakit terhadap belanja operasional pelayanannya.

Tabel 2.16
Cost Recovery Rate APBD+BLUD Tahun 2023-2025 TW I

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I
Pendapatan	256.041.005.474,47	250.793.971.490,35	56,194,407,741.38
Belanja	257.420.872.931,00	243.959.441.535,00	43,806,051,049.00
<i>Cost Recovery Rate</i>	99.46	102.80	128.28

Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Tahun 2025

Tabel 2.17
Cost Recovery Rate BLUD Tahun 2023-2025 TW I

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I
Pendapatan	166.541.999.597,47	250.793.971.490,35	56,194,407,741.38
Belanja	167.921.867.055,00	243.959.441.535,00	43,806,051,049.00
<i>Cost Recovery Rate</i>	99.18	102.80	128.28

Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai CRR nilai CRR trieulan 1 Tahun 2025 baik dari CRR BLUD maupun CRR APBD+BLUD memiliki nilai yang cukup tinggi.

2. Pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja

a) Capaian Realisasi Pendapatan

Tabel 2.18
Capaian Realisasi Pendapatan Tahun 2025 TW I

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Fungsional	167.920.381.475,00	40.703.240.501,38	24.24
Subsidi APBD	141.981.321.422,00	3..102.904.001,00	2.18

Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Tahun 2025

b) Capaian Realisasi Belanja

Tabel 2.19
Capaian Realisasi Belanja s.d TW I 2025

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja dari Sumber Dana BLUD			
Belanja Operasional (Pegawai dan Barjas)	150.443.356.373,00	27.582.552.728,00	18,33
Belanja Modal	17..477.025.102,00	732.331.081,00	4,29

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Total Anggaran BLUD	167.920.381.475,00	28.314.883.809,00	16.86
Belanja dari Sumber Dana APBD			
Belanja Operasional (Pegawai dan Barjas)	101.299.215.502,00	15.491.167.240,00	15,29
Belanja Modal	40.682.105.920,00	0	0
Total Anggaran APBD	141.981.321.422,00	3..102.904.001,00	2.18
GRAND TOTAL	309.901.702.897,00	43.806.144.502,00	14.14

Sumber : Bagian Umum dan Keuangan Tahun 2025

Realisasi belanja tahun 2025 masih belum maksimal karena masih di periode triwulan 1. Selain itu untuk belanja dari pendapatan/ sumber Dana BLUD dan APBD dilakukan penghematan dan skala prioritas.

Adapun capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024-2025
RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
					Tahun 2023		Tahun 2024	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Hasil penilaian akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100%	Paripurna	100%
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada RSUD Bhakti Dharma Husada	Nilai SAKIP RSUD Bhakti Dharma Husada	89.28	89.78	93,75	105,54%	89.28	95,00%

Sumber : Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi, 2025

Secara lengkap pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran) sesuai dengan renstra 2021 - 2026 disajikan pada tabel 2.21 di bawah ini

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Sesuai Renstra
RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah							Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025 TW I	Tahun 2025	
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	-	√	74,36	74,44	74,53	74,62	74,70	74,47	75,82	76,02	76,15	UHH Rilis akhir tahun atau maksimal bulan Januari tahun selanjutnya
2	Hasil penilaian akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada	-	√	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Survei Akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Survei Akreditasi Nasional Yang sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah							Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
3	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	√	√	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	87,45%	75,82	76,02	76,15	Hasil Survei SKM yang dilakukan oleh Bagian Organisasi, RS melakukan survei kepuasan pelanggan setiap bulan melalui aplikasi skm.surabaya.go.id
4	Nilai SAKIP RSUD Bhakti Dharma Husada	-	√	87,45	88,83	89,28	89,78	90,22	93,33	75,82	76,02	76,15	Nilai SAKIP AA

Sumber : Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi, 2025

Untuk Indikator Angka Harapan Hidup, realisasi capaian pada Tahun 2024 sudah melebihi target sehingga untuk target pada Tahun 2025 diharapkan bisa tercapai lebih mudah lagi karena pada tahun 2024 sudah melebihi target renstra. Untuk nilai UHH Tahun 2025 akan tayang dari BPS pada Bulan Januari 2026.

Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada berlaku sampai dengan 23 Oktober 2026 oleh Lembaga Akreditasi RS Damar Husada Paripurna.

Nilai Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 TW I sebesar 97,22 sudah mencapai target namun tetap dibutuhkan strategi khusus dalam rangka memberikan pelayanan yang paripurna dan memuaskan kepada masyarakat sehingga diharapkan nilai kepuasan masyarakat tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk nilai Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi, hasil laporannya akan tayang pada bulan Januari 2026.

Nilai SAKIP RSUD Bhakti Dharma Husada mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan sudah mencapai target renstra. Untuk itu hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan nilai capaian ini adalah dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi isian sakip dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak – pihak terkait penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi PD.

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya mulai tanggal 31 Mei 2019 ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum dengan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B. RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI menjadi RS Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/ MENKES/1380/2023.

Beberapa pengembangan pelayanan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah :

- Pelayanan Endoskopi Minimal Invasif
- Pelayanan Bedah Onkologi
- Pelayanan ESWL
- Pelayanan Vaksinasi Internasional
- Pelayanan Medical Check Up Corporate
- Pelayanan Klinik Spesialistik Sore
- Pelayanan Code Stroke dan Unit Stroke
- Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit
- Penambahan Mesin dan Tempat Tidur Hemodialisis
- Penambahan IRNA VIP - Renovasi Ruang Rawat Inap
- Renovasi Penggantian Pintu OK - Renovasi Bank Darah
- Renovasi Hemodialisa
- Renovasi Ruang MCU
- Renovasi Ruang Endoskopi
- Renovasi IGD
- Renovasi Ruang Casemix
- Renovasi Lobby
- Renovasi Area Komersial

Rencana Pengembangan Pelayanan Tahun 2025:

- Pelayanan Pembangunan Gedung IRNA TB RO
- Pembangunan Ruangan Cathlab
- Penataan Sistem Tata Udara Ruang Steril Kemoterapi
- Pelayanan Kemoterapi
- Renovasi OK 6
- Renovasi Klinik Estetik
- Renovasi Interior Area Komersial
- Pengembangan Sistem Pneumatic Tube

Pengembangan pelayanan yang akan dikembangkan pada Tahun 2026 yaitu meliputi :

- Pengembangan Gedung Layanan (Klinik, Kamar Operasi, ICU, Hemodialisis, Rawat Inap, CSSD, Manajemen, Parkir).
- Pelayanan Sub Spesialistik Spine Orthopedi
- Pelayanan Kardiovaskuler Intervensi
- Pelayanan Neuro Intervensi
- Pelayanan Spesialistik Orthodonsi
- Pelayanan Spesialistik Periodonsi
- Pelayanan Spesialistik Bedah Syaraf
- Pelayanan Hemodialisis ICU

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja juga harus mengidentifikasi anggaran – anggaran yang menunjang program pengarusutamaan gender (PUG). Program Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender terimplementasi melalui Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD dan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dalam rangka upaya mendukung fokus kebijakan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 yaitu menuju Surabaya Zero Stunting, maka RS berperan sebagai rujukan kasus stunting serta kasus stunting yang disertai dengan komplikasi. Semua balita stunting yang di rujuk di RS harus tertangani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu RS juga berupaya dalam upaya preventif promotif yaitu melalui kegiatan skrining bayi kongenital, dan kegiatan Promosi Kesehatan RS (PKRS).

Berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, maka tema arah kebijakan pembangunan tahun 2025 "Penguatan *bargaining position* Kota Surabaya melalui intensitas kerjasama dengan pihak strategis yang mendukung arah pembangunan". Sesuai dengan tema kebijakan

tersebut maka RSUD Bhakti Dharma Husada berupaya memperkuat jejaring RS Pendidikan karena RSUD Bhakti Dharma Husada sebagai RS Pendidikan satelit dan akan menuju ke RS Pendidikan utama. Selain memperkuat jejaring Pendidikan juga memperkuat mutu pelayanan kesehatan dengan melakukan pengembangan pelayanan kesehatan, kerjasama dengan lintas sektor, instansi kesehatan lainnya, perguruan tinggi, pihak – pihak swasta lainnya guna memasarkan produk layanan seperti *Medical Check Up* dan lain sebagainya.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, ditemui permasalahan dan hambatan yang cukup mempengaruhi kinerja rumah sakit, diantaranya :

- Pengembangan SDM belum optimal (belum memenuhi standar SPM untuk 20 jam per orang per tahun
- Masih adanya parameter SPM yang belum terpenuhi
- Penyediaan dana/ anggaran yang belum terakomodir dalam rangka pengembangan RS sesuai dengan *Master Plan* RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan rencana pentahapannya yaitu Pembangunan Gedung Medis dan Perluasan Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Kedokteran Forensik, CSSD & Laundry, Power House dan Area Komersial (Tahap I), Rehab Eksisting Gedung Lama (Tahap 2), Pembangunan Gedung Parkir (Tahap 3).
- Penyediaan dana/ anggaran dalam rangka menunjang pengembangan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran dan kebutuhan masyarakat termasuk apabila terjadi wabah
- Masih perlunya Pengembangan SIM RS secara berkelanjutan agar terintegrasi menyeluruh baik integrasi internal maupun integrasi eksternal
- Masih perlunya pemeliharaan sarana dan prasarna rumah sakit secara berkelanjutan

Permasalahan diatas memberi dampak terhadap pencapaian kinerja rumah sakit. Adapun isu strategis yang dihadapi rumah sakit dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Isu Strategis

No	Isu Strategis
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
2	Pengembangan RS
3	Percepatan Pelayanan Rumah Sakit melalui Pemanfaatan Digitalisasi
4	Pemenuhan Sarana Prasarana Rumah Sakit secara Berkelanjutan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD serta sumber daya yang dimiliki maka program yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 di RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya merupakan program untuk mendukung pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pasien dan pengunjung rumah sakit.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Rumah Sakit

Rencana aksi yang dilakukan pada Sub kegiatan diatas adalah melaksanakan pekerjaan rehabilitasi bangunan area Cathlab, Rehab Medik, CSSD, Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah, Ruang OK 6, Pematangan dan Pemagaran Lahan Baru, Poliklinik Rawat Jalan dan Pembangunan Gedung pelayanan TB RO DAK 2025. Rumah sakit rutin melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan pengembangan rumah sakit dan rehabilitasi RSUD Bhakti Dharma Husada baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga dapat selesai sesuai dengan masa kontrak dan kualitas pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

- b. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rencana aksi yang dilakukan pada Sub Kegiatan di atas adalah pembelian alat kesehatan yang bersumber dari dana APBD dan

DBHCHT, DAU dan DAK 2025 dengan output sebanyak 16 unit sebanyak unit. Untuk realiasi pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan disesuaikan dengan pagu prioritas skala Kota..

2) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Rencana aksi pada sub kegiatan ini adalah pemenuhan gaji dan tunjangan ASN. Untuk jumlah tenaga ASN baik PNS maupun Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sampai dengan triwulan I 2025 berjumlah 478 Orang.

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rencana aksi pada sub kegiatan ini adalah pemenuhan honor narasumber Eselon II untuk pendampingan dari DPRD. Untuk kegiatan pendampingan ini disesuaikan dengan kesepakatan *schedule* dari Sekretaris Dewan dengan Perangkat Daerah masing – masing.

3. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Rencana aksi yang dilakukan pada kegiatan diatas adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit meliputi Listrik, air, telpon, sewa bandwidth, belanja obat - obatan, bahan habis pakai, alat medis habis pakai, pelayanan gizi pasien, pelayanan radiologi, darah PMI dan radiologi luar, dsb.
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
- c. Pengadaan barang dan jasa perkantoran
- d. Pemeliharaan rutin alat kesehatan/ kalibrasi alat kesehatan
- e. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM RS melalui Pelatihan baik *in house training* maupun *exhouse training*.
- f. Pendampingan manajemen dalam upaya meningkatkan mutu manajerial maupun pelayanan RS

- g. Pemberian imbalan jasa pelayanan kesehatan pada pegawai baik ASN maupun Non PNS
- h. Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
- i. Perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah
- j. Pengembangan dan Maintenance IT
- k. Belanja Modal Barang dan Jasa BLUD

Pagu pada program ini nantinya akan disesuaikan dengan target pendapatan dan pemanfaatan SILPA Tahun 2024. Adapun untuk output pada kegiatan dan sub kegiatan pada program ini tidak mengalami perubahan.

Secara detail rancangan perubahan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
RSUD Bhakti Dharma Husada
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82 %	246,136,138,637	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82 %	258,185,996,977	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89 %				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89 %		
	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	77,005,757,162	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	89,055,615,502	
	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	478 Orang/bulan	77,005,757,162	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	478 Orang/bulan	89,055,615,502	
	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,210,000,000	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,210,000,000	
	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,210,000,000	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,210,000,000	
	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100 %	167,920,381,475	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100 %	167,920,381,475	
	1.02.01.2.10.0001	RSUD	Jumlah BLUD yang	1 Unit Kerja	167,920,381,475	1.02.01.2.10.0001	RSUD	Jumlah BLUD yang	1 Unit Kerja	167,920,381,475	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bhakti Dharma Husada	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bhakti Dharma Husada	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
2	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98 %	40,715,705,920	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98 %	40,715,705,920	
	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 %	40,715,705,920	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 %	40,715,705,920	
	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	12,865,628,540	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit	12,865,628,540	
	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan / atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	27,850,077,380	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan / atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	27,850,077,380	

Dari tabel 3.1 diatas indikatif pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi Rp. 258,185,996,977,- dimana untuk kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 89,055,615,502 kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 1,210,000,000,- dan untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sebesar Rp. 167,920,381,475,-. Sedangkan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 40,715,705,920,-

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja RSUD Bhakti Dharma Husada Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan RSUD Bhakti Dharma Husada pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja RSUD Bhakti Dharma Husada Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 10 Juni 2025

Plt. Direktur,



dr. Arif Setiawan, M.Kes

Pembina IV/a

NIP 198201092011011007